

KPU Barru Cetak Sejarah Buruk, HMI Desak Bawaslu Usut Kegiatan Debat Publik Pertama

Muh. Ahkam Jayadi - BARRU.INDONESIASATU.ID

Oct 31, 2024 - 09:53



BARRU- Kegiatan debat publik pertama Pilkada Barru tahun 2024 yang digelar oleh komisi pemilihan umum (KPU) pada Rabu kemarin (30/10/2024) menuai sorotan dari berbagai pihak dan dinilai tidak profesional dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada.

Pelaksanaan debat pertama tersebut sekaligus menjadi sejarah buruk yang dicatatkan oleh KPU Barru dengan adanya kejadian berupa kesalahan teknis dan

ketidaknyamanan dalam proses debat publik.

Ketua HMI cabang Barru Hendra mengungkapkan bahwa KPU Barru dalam melaksanakan tahapan debat publik pertama dinilai tidak amanah dan menjadi catatan buruk di ruang lingkup penyelenggara Pemilu.

"KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan Pilkada harus tetap menjaga stabilitas demokrasi. Dan memang KPU harus memperhatikan betul segala aspek yang di perlukan dalam debat Paslon", tegasnya pada Kamis (31/10/2024).

"Oleh sebab itu saya mendesak Bawaslu kabupaten barru untuk melek dan tidak buta terhadap kejadian seperti ini karena salah satu tupoksi dari Bawaslu memastikan KPU bekerja dengan baik. Bawaslu sebagai badan pengawas harus menindak lanjuti atau mengusut dengan baik kejadian seperti ini", imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Barru Farida, SH yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa terkait peristiwa yang terjadi pada debat publik Pilkada tersebut adalah insiden yang tidak terduga dengan adanya trapo milik PLN yang tiba-tiba meledak sehingga listrik tiba-tiba padam pada saat debat berlangsung.

"Kami dari Bawaslu sudah menyampaikan surat penegasan ke KPU, untuk betul-betul cermat dalam persiapan debat selanjutnya yang rencananya digelar pada 13 November 2024. ytamanya memperhatikan desain acara, jadwal dan tempat penyelenggaraan yang refresentatif dan nyaman", ungkap Farida.

"Termasuk perencanaan cadangan listrik seperti Genset dan Event Organiser pelaksana kegiatan mempunyai keahlian dan persiapan yang matang dan SDM Moderator yang memandu debat dari kalangan profesional dan akademisi, memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan", pungkasnya.